



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERPARKIRAN PADA KANTOR PD PARKIR MAKASSAR RAYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

Muh. Wahyudi Mokobombang, Budi Setiawati

Administrasi Publik, wahyudi.mokobombang81@gmail.com, STIA YAPPI Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, budipalangkey@gmail.com Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing how the process of managing parking retributions in Makassar City, what are the obstacles experienced in its management so far, the mechanism of collection, deposit until it arrives at the acceptance process into PAD which leads to / is beneficial for the development of Makassar City.

The type of research that will be used is descriptive research type, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field regarding regional retribution which is focused on the management of parking fees in Makassar City. Data collection is done by means of surveys, interviews, observations, questionnaires.

Based on the results of the research conducted, it can be seen that the parking retribution management process is managed by the Makassar Raya Parking Area Company, starting from payments made by service users to parking attendants, parking attendants depositing to collecting officers, receiving treasurers and then deposits to the City Government until they can be paid for. referred to as PAD Makassar City from the levy sector, especially parking.

Keywords: *Effectiveness Management, PAD*

ABSTRAK

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik. Kantor pemerintahan walikota Makassar bagian perlengkapan memiliki tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, apa saja hambatan yang di alami dalam pengelolaannya selama ini, mekanisme pemungutan, setoran hingga tiba pada proses penerimaan menjadi PAD yang bermuara / bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang retribusi daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey, wawancara, observasi, kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, mulai dari pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada juru parkir, setoran juru parkir kepada petugas pemungut, penerimaan bendahara kemudian setoran pada Pemerintah Kota hingga dapat disebut sebagai PAD Kota Makassar dari sektor Retribusi khususnya parkir.

Kata Kunci: Efektivitas, Manajemen, PAD

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di PD. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan kemudian masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa juru parkir bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir.

Fenomena Kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak PD Parkir Makassar Raya. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab PD Pakir Makassar Raya dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diharapkan mampu mengelola manajemen parkir dengan baik dengan memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkiran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas adalah tercapainya tujuan tersebut, artinya sesuatu dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan rencana awal dan mempunyai pengaruh perubahan ke arah yang diinginkan. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan pencapaian tujuan awal dengan hasil setelah rencana dijalankan, jika pencapaian tujuan dibandingkan dengan hasil

rencana yang telah dicapai maka dapat dikatakan efektif, tetapi jika tujuan awal adalah tidak sesuai dengan hasil maka dapat dikatakan tidak efektif.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Istilah Manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya memiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya Retribusi parkir.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Disebut penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen. Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya.

Dalam pengelolaan retribusi parkir di PD Parkir Kota Makassar masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kota Makassar maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari

efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

1. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kota makassar yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di PD Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar.
2. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja.
3. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu PD Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur PD Parkir Makassar Raya masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hambatan yang terjadi yaitu hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor), juru parkir liar, lahan parkir yang kurang, maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

1. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif
2. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel
3. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran
4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan masih sangat kurang

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari PD Parkir Makassar Raya.
2. Kepada kolektor/petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.
3. Kepada Direktur PD Parkir harus lebih memperhatikan kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor pemungut retribusi parkir.
4. Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- [1] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat. 2007
- [2] Kesit, Bambang Prakosa. *Pajak dan Retribusi Daerah*. cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- [3] Manulang., *Dasar dasar manajemen.*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2002
- [4] Mardiasmo., *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002.
- [5] Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset. 2004.
- [6] Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2005
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, CV. Bandung. 2013.
- [8] Tangkilisan. *Manajemen publik*, Jakarta : Grasindo. 2005
- [9] Wijayanti, Irine Diana Sari Se, Mm. *Manajemen*. Yogyakarta : MITRA CENDIKIA offset. 2008.
- [10] Zaidan Nawawi., *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

- [11] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- [12] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat
- [13] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Ruang Lingkup APBD
- [15] Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [16] SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum